

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI/ <i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Keaslian penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa.....	10
B. Keuangan Desa Dan Aset Desa.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian (sifat dan pendekatan).....	28
B. Sumber data.....	28
C. Teknik pengumpulan data.....	32
D. Analisis data.....	32
E. Jalannya penelitian.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keuangan Desa Dan Aset Desa Dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa.....	34
1. <i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madura</i> dan <i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie voor Buitengewesten</i>	34
2. <i>Ordonnantie Staatsblad</i> 1941 Nomor 356.....	40
3. Pemerintahan Jepang.....	41
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kurun Waktu I.....	44
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.....	46
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan.....	47
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.....	49
8. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950.....	54
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Mengubah <i>Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448)</i> Dan <i>Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 Nomor 419)</i> Sebagai Undang-Undang.....	55

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.....	58
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kurun Waktu II	62
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.....	63
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.....	65
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	69
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.....	70
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.....	73
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.....	80
18. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua.....	80
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1	

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.....	82
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	83
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	91
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.....	92
B. Otonomi Maupun Kemandirian Desa Apabila Dikaitkan Dengan Keuangan Desa Dan Aset Desa.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115